

## Hikmahanto Juwana Jadi Komisaris Utama JakPro

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta merombak jajaran komisaris PT Jakarta Propertindo (JakPro). Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana ditunjuk menjadi Komisaris Utama JakPro baru.

Hal tersebut disampaikan melalui Instagram resmi JakPro, @jakprogroupp. Dilihat pada Jumat (27/10), Hikmahanto menggantikan komisaris utama sebelumnya Hamdan Zoelva.

Selain Hikmahanto, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga mengangkat dua dewan komisaris baru lainnya, yaitu Agus Susanto dan Lusiana Herawati.

“Selamat bertugas kepada Dewan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perse-rod) Bapak Hikmahanto Juwana (Komisaris Utama), Bapak Agus Susanto (Komisaris) dan Ibu Lusiana Herawati (Komisaris). Mari, kita bersama membangun untuk Jakarta dengan karya-karya yang mendunia,”

demikian informasi yang disampaikan JakPro melalui Instagramnya.

Selain dewan komisaris, Direktur Keuangan JakPro, Adrian Rusmana juga diganti. JakPro juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran komisaris maupun direksi lama atas dedikasinya selama beberapa tahun terakhir.

“Sege-nap Insan Jakpro mengucapkan terima kasih atas karya dan dedikasi dalam membangun dan memajukan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada Bapak Hamdan Zoelva (Komisaris Utama), Bapak Nurmansjach Lubis (Komisaris), Bapak Dwi Wahyu Daryoto (Komisaris), Bapak Sigit Wijatmo (Komisaris) dan Bapak Adrian Rusmana (Direktur Keuangan),” jelasnya.

Berikut susunan dewan komisaris JakPro terbaru: Komisaris Utama JakPro: Hikmahanto Juwana,

Komisaris JakPro: Agus Susanto, Komisaris JakPro: Lusiana Herawati. ● yan

## Damkar Depok Evakuasi 25 Ekor Monyet Berkeliaran di Permukiman Warga

DEPOK (IM) - Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok kembali melakukan evakuasi terhadap seekor monyet yang berkeliaran di permukiman warga. Selama musim kemarau ini, sudah sekitar 25 ekor monyet yang berhasil dievakuasi.

Monyet ini sering terlihat di permukiman dan bahkan masuk ke rumah warga. Evakuasi monyet ini dilakukan oleh petugas Pemadam Kebakaran Kota Depok di wilayah Sukmajaya, tepatnya di Jalan Proklamasi Raya Depok 2 Timur, Sukmajaya, Depok.

Evakuasi ini dilakukan berdasarkan laporan warga yang merasa resah dengan keberadaan monyet tersebut. Selain sering masuk ke rumah, warga juga khawatir bahwa monyet tersebut dapat menyerang anak-anak. Komandan Regu Pos Damkar Merdeka, Romi Affandie, mengungkapkan dugaan bahwa monyet ini merupakan monyet peliharaan yang lepas. Monyet ini kerap masuk ke rumah-rumah warga dan mengambil makanan.

“Menurut informasi, monyet tersebut adalah monyet peliharaan yang lepas. Dia sering masuk ke rumah-rumah warga, terkadang mengambil makanan di warung-warung,” ujar Romi Affandie pada Jumat (27/10).

Keberadaan monyet ini sudah menjadi keluhan warga selama beberapa hari.

Karena kekhawatiran akan serangan monyet tersebut, warga meminta petugas untuk melakukan evakuasi.

“Para warga merasa resah dan terganggu, sehingga mereka menghubungi kami untuk dilakukan evakuasi,” tambahnya.

Dalam proses evakuasi, petugas menggunakan obat bius untuk melumpuhkan monyet agar dapat dievakuasi dengan lebih mudah.

“Kami memiliki senjata bius dan secara manual menggunakan jaring atau jebakan. Monyet ini lincah dan habitatnya di atas, sehingga kami kesulitan mengejanya saat dia berlari dari rumah ke rumah,” jelasnya.

Monyet-monyet ini diduga berasal dari kawasan Cibubur, atau ada juga yang merupakan monyet peliharaan yang lepas dari kandang.

“Telah berhasil dievakuasi sekitar 25 ekor monyet. Berdasarkan pengalaman, sebagian besar monyet ini adalah hasil peliharaan sejak kecil yang kemudian dilepaskan oleh pemiliknya setelah monyet itu dewasa dan tidak dapat lagi dirawat atau terlepas dari pemilikinya. Ada juga yang diduga berasal dari Cibubur dan berakhir di Depok,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah monyet liar menyerang pemukiman warga di wilayah Cipayung Jaya pada Minggu (8/10/2023). Satu orang anak terluka pada bagian wajah akibat serangan monyet liar tersebut. ● yan

## Kasus Cacar Monyet di DKI Bertambah 2 Orang

JAKARTA (IM) - Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI merilis data terbaru kasus cacar monyet atau Mpox, yang kini bertambah menjadi dua kasus pada Kamis (26/10).

Dua pasien tersebut terindikasi berdomisili di DKI Jakarta, yang mana, jika diakumulasi sejak temuan pertama cacar monyet di DKI Jakarta pada 2022, hingga kini totalnya mencapai 17 orang. Satu kasus di 2022 dinyatakan sembuh, sementara 16 pasien masih menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit.

“Ada 16 orang kasus aktif, positivity rate PCR 44 persen, semuanya bergejala ringan,” kata juru bicara Kemkes RI, dr Mohammad Syahril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11).

Hingga saat ini, Dinas

Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sudah mencapai 50 persen dari target 495 penerimaan vaksinasi Mpox atau cacar monyet.

“Total Penerima Vaksinasi 251 orang dari target 495 orang,” kata dr Syahril.

Dengan bertambahnya dua orang yang positif cacar monyet, dengan rentan usia 25 - 50 tahun, berikut data lengkapnya:

- 1 kasus 13 okt 2023 (isolasi RS)
- 1 kasus 19 okt 2023 (isolasi RS)
- 5 kasus 21 okt 2023 (isolasi RS)
- 2 kasus 23 okt 2023 (isolasi RS)
- 3 kasus 24 okt 2023 (isolasi RS)
- 2 kasus 25 okt 2023 (isolasi RS)
- 2 kasus 26 okt 2023 (isolasi RS). ● yan

# 4 Metropolis

IDN/ANTARA



## GARUDA INDONESIA TRAVEL FAIR 2023

Pengunjung antri untuk mendapatkan tiket pesawat murah yang ditawarkan diajang Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2023 yang didukung oleh Bank Mandiri di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (27/10). Pada GATF tahun ini, Garuda Indonesia menyediakan tiga puluh ribu kursi pesawat murah serta Bank Mandiri menawarkan program khusus bagi pemegang Mandiri kartu kredit.

# Bapemperda DPRD DKI Targetkan Bahas 29 Raperda Tahun Depan

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta jajarannya termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul Raperda untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

JAKARTA (IM) - Sebanyak 29 rancangan peraturan daerah (Raperda) disepakati sebagai program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) untuk dibahas tahun 2024 mendatang.

Jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan per-

timbangan prioritas untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta jajarannya termasuk Satuan Kerja Perang-

kat Daerah (SKPD) pengusul Raperda untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Salah satunya Naskah Akademik agar pembahasan bisa berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Ya tentu kita minta pertama persiapan eksekutif yang mengusulnkan supaya bersurat ke DPRD yang belum bersurat. Kemudian akan di Paripurnakan, setelah itu, sudah menjadi ranahnya Bapemperda untuk menjadi pembahasan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/10).

Sementara itu, Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Pem-

prov DKI Jakarta, Fadjar menyatakan kesiapannya untuk mendorong SKPD pengusul melengkapi semua syarat yang akan menjadi dasar pembahasan. “Alhamdulillah hari ini rapat Bapemperda antara legislatif dan eksekutif telah menyepakati 29 Raperda yang akan ditetapkan di Propemperda 2024. Insha Allah ini akan menjadikan DKI yang lebih baik kedepannya,” ucapnya.

Adapun ke 29 Propemperda tahun 2024 mendatang antara lain, Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Raperda Jaringan Utilitas, dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lalu, Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), Raperda Rencana Induk Transportasi, Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Penyelenggaraan

Sistem Pangan, dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta 2023-2043. Kemudian, Raperda Rumah Susun, Raperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah), Raperda Fasilitasi Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan, dan Penyalahtunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Raperda Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah). Selanjutnya, Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT JIEP, Raperda Pengelolaan Air Minum, Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Transjakarta Menjadi Perseroan Terbatas Transjakarta (Perseroan Daerah), Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi DKI Jakarta, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta Tahun 2025 - 2045, Raperda Penguatan Ideologi Pancasila, Pemajuan Kebudayaan Betawi, serta Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga. ● yan

## Cegah Boros Pangan, DKI Gandeng Bapanas

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Suharni Eliawati mengata-

kan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan tim penggerak PKK dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam gerakan ‘stop boros pangan’.

Selain mendorong penyusunan regulasi, kata Suharni Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kerja sama dengan lembaga sosial seperti Food Bank of Indonesia (FOI) yang menjembatani antara masyarakat berlebihan makanan dengan masyarakat yang membutuhkan. Adapun ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98% berasal dari pasokan luar daerah. Anggota DPRD DKI, Israyani menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun bank makanan (food bank) untuk

potensi terbuang,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (27/10).

Ia mengatakan, kerja sama dengan lembaga sosial seperti Food Bank of Indonesia (FOI) yang menjembatani antara masyarakat berlebihan makanan dengan masyarakat yang membutuhkan. Adapun ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98% berasal dari pasokan luar daerah. Anggota DPRD DKI, Israyani menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun bank makanan (food bank) untuk

menjaga pangan berlebih menjelang masa kedaluwarsa.

“Perlu dibangun mekanisme semacam bank makanan untuk pengelolaan pangan berlebih ini agar bisa dimanfaatkan pada kelompok rentan atau rawan pangan di Jakarta,” kata Israyani.

Politisi PKS itu menuturkan, saran ini terkait Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan agar ada aturan yang lebih kuat untuk mendorong pemanfaatan pangan terbuang. ● yan

## Indra Gunawan Paparkan Inovasi 7 Program Prioritas untuk Generasi Z

DEPOK (IM) - Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, menjadi tamu dalam dialog ‘Detik Pag’ yang dipandu Ario Astungkoro dan Indi Arisa, Kamis (26/10).

Obrolan ringan yang dikemas dengan gaya santai tersebut, bertujuan memberi edukasi kalangan milenial atau Gen Z untuk memahami secara singkat 7 layanan prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Sebenarnya ada 120 layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN. Namun, 7 layanan ini lebih diminati oleh masyarakat. Maka dijadikanlah prioritas yang ditetapkan oleh Menteri,” ujar Indra Gunawan dalam sesi tanya jawab.

Tujuh layanan prioritas tersebut sambung Indra, merupakan bentuk inovasi pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, objektif, efisien, dan profesional yang dikemas dengan prosedur layanan sederhana dan berbasis teknologi informasi terkini.

Basis teknologi ini, kata dia, didukung oleh area pelayanan yang nyaman, dan dipastikan tidak ada tebang pilih sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN.

Nah, tujuh layanan prioritas itu terdiri dari Pengecekan



FOTO: KEMENTERIAN ATR/BPN

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, memberikan edukasi bagi kalangan milenial terkait 7 Layanan Prioritas Kementerian ATR BPN yang dipandu Ario Astungkoro dan Indi Arisa, Kamis 26 Oktober 2023.

Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, sampai Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.

“Dengan adanya 7 layanan prioritas ini, maka skema penyelesaiannya juga lebih jauh cepat. Apalagi di era digital saat ini. Fasilitasnya, sudah disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Masyarakat tinggal mengakses saja,” paparnya.

Terbaru, sambung Indra, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk kemudahan. Aplikasi Sentuh Tanahku dapat memudahkan Anda untuk mengakses layanan-layanan Kementerian ATR/BPN.

Sampai-sampai, Kementerian ATR/BPN pun menyediakan kolom keluhan dan kritik terkait pertanahan dan tata ruang dengan memanfaatkan akun media sosial resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) @atr\_bpn dengan menyertakan tagar #TanyaATRBP.

“Bahkan, kami di Kantor Pertanahan Kota Depok telah mengaggas aplikasi Bermata (Berantas Mafia Tanah). Aplikasi ini disiapkan untuk menampung aduan masyarakat, temuan yang terjadi di lapangan secara faktual dengan menyertakan dokumen terkait,” jelas Indra Gunawan.

Ketika ditanya soal munculnya akuisisi bidang tanah hingga masuk pada ranah hukum atau gugatan, Indra mengatakan ada sejumlah hal yang menjadi faktor pencecutnya. Salah satunya sikap abai terhadap aset tanah itu sendiri.

“Kota Depok merupakan ‘zona baper’. Contoh saja begini, orang-orang yang bekerja di Jakarta memiliki aset tanah di Depok, lalu terkadang mereka tidak mengurus tanahnya. Dibiarkan bertahun-tahun dan dianggap sebagai investasi,” kata Indra mencontohkan.

Masyarakat yang memiliki tanah yang telah diakui negara kerap lalai, bahwa ketika sudah diberikan sertifikat maka kewajiban pemilik tanah adalah memelihara dan menguasai secara fisik tanah tersebut.

“Yang sering kita temukan, ada tanah yang dibiarkan bertahun-tahun dan tidak dikuasai secara fisik. Sementara riwayat tanah ada di Kabupaten Bogor (sebelum pemekaran). Nah, pemberian

ini yang kerap menimbulkan sengketa konflik dan perkara,” jelas Indra Gunawan.

Untuk diketahui, 7 layanan prioritas Kementerian ATR/BPN yakni:

1. Pengecekan sertifikat: Layanan untuk mengetahui status kepemilikan tanah seseorang.
  2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT): Layanan untuk memperoleh informasi mengenai status pendaftaran tanah.
  3. Hak Tanggungan Elektronik (HTE): Layanan untuk mendapatkan jaminan utang dengan menggunakan tanah sebagai agunan.
  4. Roya: Layanan untuk menghapus atau melepaskan hak tanggungan atas tanah.
  5. Peralihan: Layanan untuk mengubah hak atas tanah dari satu orang ke orang lain.
  6. Pendaftaran surat keputusan: Layanan untuk mendaftarkan surat keputusan yang berkaitan dengan tanah.
  7. Perubahan HGB/HPL menjadi Hak Milik (HM): Layanan untuk mengubah status tanah dari HGB/HPL menjadi HM.
- “Kami berharap dengan penjelasan ini masyarakat khususnya kalangan milenial atau generasi Z terbantu untuk mengenal 7 layanan prioritas Kementerian ATR/BPN,” pungkaskan Indra Gunawan. ● ber

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), dengan ini kami umumkan bahwa para pemegang saham PT ENERGI BUMI INDAH (“Perseroan”) berencana melakukan pemindahan hak atas seluruh saham dalam Perseroan kepada PT DAMAI PELITA PERKASA dan PT PERINTIS MANDIRI UTAMA, yang mengakibatkan terjadinya perubahan kendali dalam Perseroan.

Pengambilalihan saham ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (7) UU PT. Setiap keberatan dari para pihak yang berkepentingan maupun kreditor atas rencana pengambilalihan tersebut, harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan ke alamat berikut ini:

Sudirman Plaza – Plaza Marein Lantai 21 A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Jakarta, 28 Oktober 2023  
Direksi PT ENERGI BUMI INDAH  
Direksi PT DAMAI PELITA PERKASA  
Direksi PT PERINTIS MANDIRI UTAMA